



Analisis Efisiensi Ekonomi Terhadap Ketahanan Cadangan Amunisi Strategis Guna Menghadapi Operasi Tempur Laut

Analysis of Economic Efficiency on The Resilience of Strategic Ammunition Reserves For Facing Marine Combat Operations

Asep Iwa Soemantri^{1*}, Irawan Didik Prabowo², Kustianing Sekar³

¹ Universitas Pertahanan, Jl. Bumimoro Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur, 60178, Indonesia

² Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Laut, Jl. Jl. Bumi Moro, Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur
60178, Indonesia

³ Akademi Angkatan Laut, Jl. Bumimoro Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur, 60178, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: aseps,soemantri@idu.ac.id

Paper received: 10-01-2024; revised: 03-02-2024; Accepted: 17-04-2024; Published: 30-06-2024

Abstract

The population growth in the world is getting out of control, and fossil energy will soon run out. This incident led to a struggle for resources from foreign countries with Indonesia. This article emphasizes the issue of violations of the territory of the Chinese State in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) in Natuna Waters. The Indonesian state, especially the Indonesian Navy, must defend the territory of the Republic of Indonesia with all its capabilities to carry out Sea Combat Operations during crisis conditions. The limited availability of KRI strategic ammunition reserves to face this threat will, of course, hinder the Indonesian Navy from carrying out its main duties. Using the operation logistics theory by Henry E. Eccles, namely strategy, logistics, and tactics, this article concludes that the development of the national defense industry must support the availability of KRI strategic ammunition. This conclusion results from the Soft System Methodology approach with the NVivo12 software.

Keywords: KRI Strategic Ammunition; National Defense Industry; Marine Combat Operations, SSM, NVivo12.

Abstrak

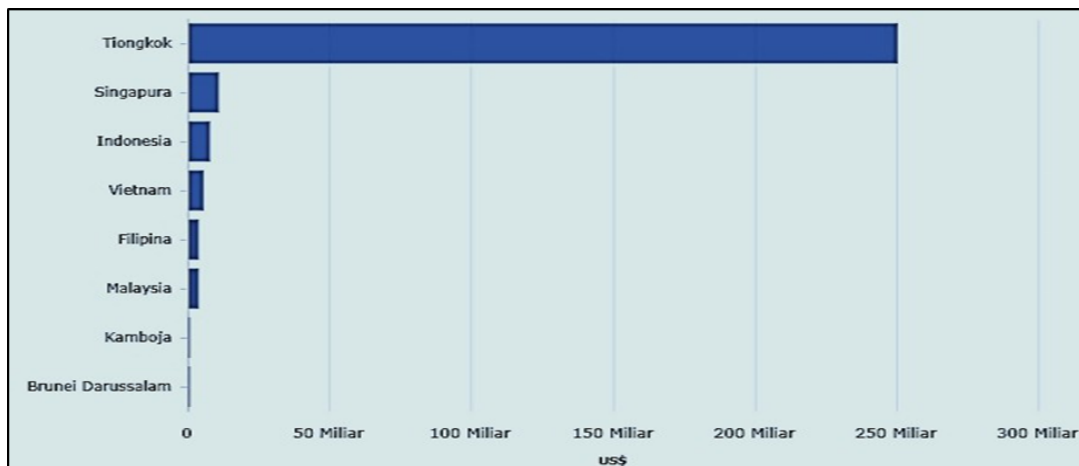
Pertambahan jumlah penduduk dunia semakin tidak terkendali dan energi fosil akan segera habis. Kejadian ini menyebabkan perebutan sumber daya dari negara asing ke Indonesia. Tulisan pemikiran ini menekankan pada isu pelanggaran wilayah Negara Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna. Negara Indonesia khususnya TNI AL harus mempertahankan wilayah NKRI dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan Operasi Tempur Laut saat kondisi krisis. Ketersediaan cadangan amunisi strategis KRI yang terbatas dalam rangka menghadapi ancaman tersebut tentu saja akan menghambat TNI AL dalam rangka melaksanakan tugas pokok. Dengan menggunakan teori logistik operasi oleh Henry E. Eccles yakni strategi, logistik, dan taktik artikel ini menyimpulkan bahwa ketersediaan amunisi strategis KRI harus di dukung oleh pengembangan industri pertahanan nasional. Kesimpulan ini hasil dari pendekatan metode Soft System Methodology dengan software Nvivo12.

Kata kunci: Amunisi Strategis KRI; Industri Pertahanan Nasional; Operasi Tempur Laut, SSM; Nvivo12.

1. Pendahuluan

Menurut Kebijakan Perencanaan TNI AL, pada Bab II tentang Perkiraan Ancaman, Nomor 8 mengenai Ancaman Potensial menyebutkan bahwa pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna, termasuk kegiatan Penangkapan Ikan yang

Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU) oleh Penjaga Pantai Tiongkok baru-baru ini, meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik terbuka antara Indonesia dan Tiongkok. Beberapa insiden di Laut Natuna Utara bahkan mengundang kehadiran Presiden RI Joko Widodo yang memeriksa kesiapsiagaan unsur-unsur Operasi Siaga Tempur Laut di Dermaga Faslabuh Satuan TNI Terkoordinasi di Selat Lampa. Presiden menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut di ZEE. Keberanian Tiongkok dalam mengklaim perairan di Natuna Utara didorong oleh kemajuan pesat ekonomi mereka dan diimbangi dengan anggaran militer yang sangat besar. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki anggaran militer terbesar di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan, yaitu sebesar US\$ 250 miliar atau sekitar Rp 3.500 triliun (kurs Rp 14.000/US\$). Singapura mengikuti dengan anggaran US\$ 10,8 miliar atau Rp 151,2 triliun, dan Indonesia di posisi ketiga dengan US\$ 7,4 miliar atau sekitar Rp 103,6 triliun. Anggaran militer negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Anggaran Militer Sekitar Laut China
(Sumber: World Bank, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang, TNI memiliki tiga tugas utama: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan. Saat menjalankan operasi tempur laut dalam kampanye militer, TNI membutuhkan dukungan logistik yang terpadu seperti bahan bakar, amunisi, makanan, dan obat-obatan untuk menghadapi armada musuh dan memenangkan pertempuran.

Namun, ketersediaan amunisi saat ini sangat terbatas karena anggaran pertahanan yang belum memadai. Kebutuhan amunisi strategis yang diperlukan untuk menghadapi serangan dengan proporsi 3:1 belum terpenuhi, terutama dalam situasi perang. Cadangan amunisi strategis yang tersedia saat ini juga terbatas dan tidak memadai untuk kondisi perang terbuka.

TNI AL harus mampu memenuhi kebutuhan amunisi dalam situasi perang, tetapi saat ini belum ada cara atau proses pengadaan amunisi strategis yang diatur dalam peraturan pemerintah untuk kondisi perang. Proses pengadaan amunisi strategis saat ini menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Proses ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 10 hingga 12 bulan, sehingga tidak cocok untuk kondisi perang yang membutuhkan amunisi dengan cepat.

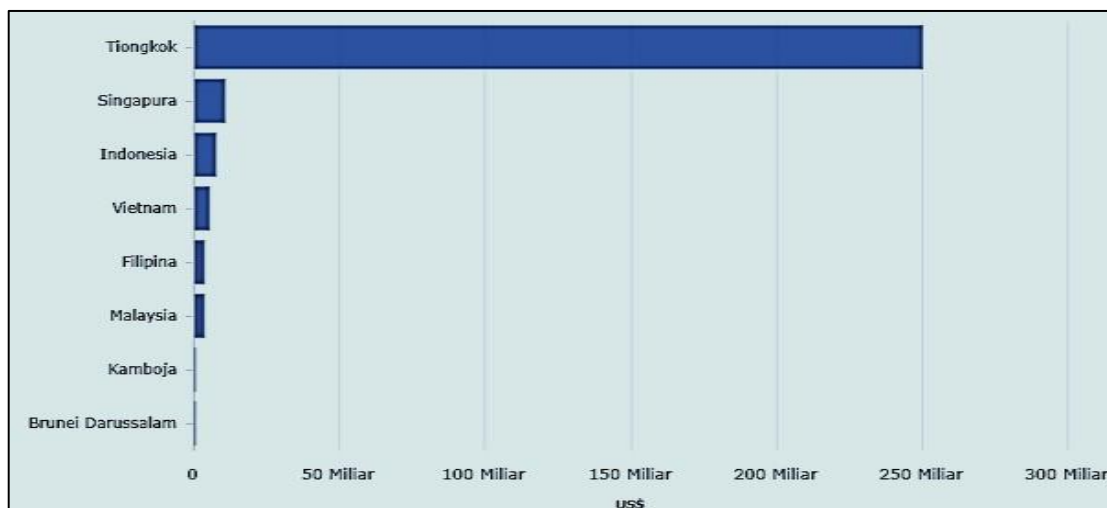
Modernisasi peralatan pertahanan dan pemenuhan logistik tempur sering terhambat oleh embargo dari beberapa negara, seperti embargo suku cadang pesawat tempur. Rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional juga memperparah kondisi ini. Ketidaksesuaian antara kebutuhan peralatan pertahanan dan kemampuan industri pertahanan nasional menjadi salah satu penyebab ketergantungan pada negara lain.

Oleh karena itu, pengembangan teknologi dan industri pertahanan harus ditingkatkan karena merupakan bagian penting dari industri strategis yang mencerminkan kemajuan dan kredibilitas negara di dunia internasional. Penelitian ini bertujuan menemukan cara-cara pengadaan amunisi strategis KRI saat kondisi perang dari berbagai narasumber dan literatur, serta menentukan alternatif terbaik untuk Indonesia saat ini.

Penelitian ini menggunakan Software Nvivo Versi 12 untuk pengolahan data dan analisis hasil dengan Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada TNI AL mengenai pengadaan amunisi pada saat perang atau kampanye militer. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membuat judul "Analisis Cara Pengadaan Amunisi Strategis KRI Guna Menghadapi Operasi Tempur Laut Pada Masa Perang."

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menganalisisnya menggunakan program Nvivo12. Setelah data di import ke dalam program Nvivo12, tahap selanjutnya adalah melakukan tahapan Mind Mapping, yang bertujuan untuk mempermudah cara pemahaman peneliti terhadap model penelitiannya yang tertuang pada tampilan di layout, hasil Mind Mapping dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

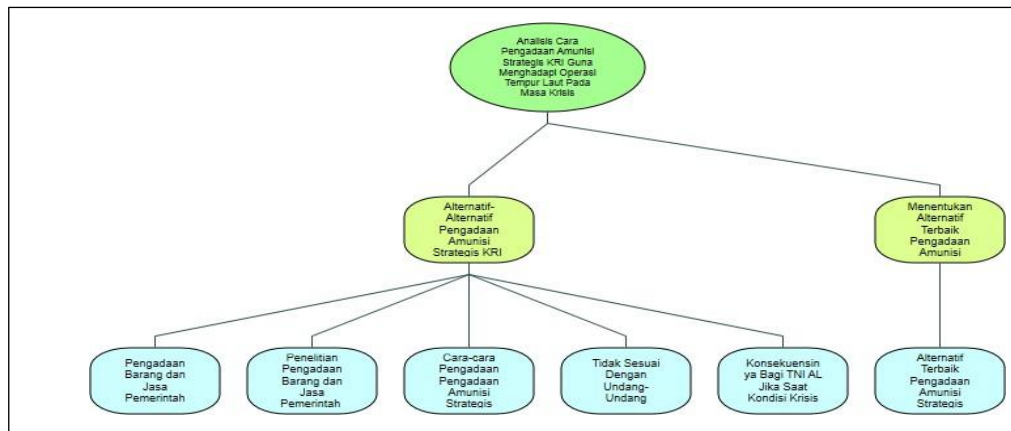


Gambar 2 Proses Mind Mapping

(Sumber: Olahan Sendiri Nvivo, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil akhirnya yaitu berupa triangulasi dimana seluruh data wawancara telah di masukan sesuai dengan coding dan mapping yang telah dilaksanakan di atas, maka hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Triangulasi Proses Penelitian

(Sumber: Olahan Sendiri Nvivo, 2020)

Dalam memproses data penelitian kualitatif yang diperoleh langsung dari narasumber, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memvalidasi data dalam penelitian kualitatif, yang menggunakan pendekatan multiperspektif berbasis pada pola pikir fenomenologis. Dengan kata lain, untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, perlu digunakan berbagai sudut pandang.

Triangulasi dalam penelitian ini mencakup:

1. Triangulasi Sumber: Untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai analisis pengadaan amunisi strategis KRI, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Narasumber utama dalam penelitian ini meliputi pejabat eksekutif dari Mabesal, akademisi dari STTAL, ITS, dan UNHAN.
2. Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode penelitian untuk mengatasi satu masalah, seperti wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara yang dilengkapi dengan observasi dan brainstorming bersama para ahli selama wawancara berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan pemikiran dari para ahli tersebut.
3. Triangulasi Teori: Menggunakan beragam teori untuk memahami data dengan lebih baik. Jika berbagai teori tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama, maka validitas hasil penelitian dapat dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Hasil Pengolahan Data

Selanjutnya peneliti melanjutkan pada langkah triangulasi melalui software Nvivo dengan mempergunakan 7 tahapan dengan analisis pendekatan yang mengacu pada Soft System Methodology (SSM). Dalam hal ini SSM memberikan penekanan terhadap aspek pengetahuan dan pengalaman dari narasumber berdasarkan objek penelitian yang

dimaksudkan, lalu selanjutnya direkomendasikan sebagai langkah untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil dari objek penelitian. Peneliti menganalisa melalui analisa sosial dan politik berdasarkan pada tahapan analisa intervensi dengan outcome gambaran lengkap sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Analisa Intervensi

Pada tahapan ini, peneliti memperoleh pemahaman bahwa situasi yang dianalisis serta menentukan subjek penelitian yang sesuai dengan penelitian. Checkland mengungkapkan bahwa tiga aspek yang memiliki korelasi yang sangat erat dengan masalah penelitian adalah klien (clients), praktisi (practitioners), dan pemilik isu (owners). Dalam konteks penelitian ini, salah satu dari tiga aspek tersebut besar kemungkinan memiliki kontribusi atau peran yang sangat signifikan. Hal tersebut dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Client (C)

Client yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pihak yang mempunyai peran secara langsung dalam intervensi penelitian. Penelitian ini menetapkan clientnya adalah Peneliti Pasis Dikreg Seskoal Angkatan-58 (Mayor Laut Suplai Irawan Didik Prabowo) dan Pembimbing I (Kolonel Laut Suplai Dr. Asep Iwa Soemantri, S.E., M.M).

2. Praktisi (P)

Praktisi yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada pihak yang mempunyai peran untuk mengkaji dengan mempergunakan SSM. Praktisi dalam penelitian ini adalah Peneliti (Irawan Didik Prabowo). Tanggung jawab praktisi terdiri dari pengolahan dan pengklasifikasian data menjadi bentuk rich picture.

3. Owners (O)

Owners sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam masalah penelitian, mempunya kepentingan dan merasakan langsung impact dari masalah penelitian. Owners yang dimaksud dan memiliki korelasi erat dengan penelitian ini adalah Paban V Straops Sopsal, Kadissenlekal, Rektor UNHAN, dan Laksamana Pertama TNI. Pembuat aturan atau yang sering disebut dengan regulator mampu memberikan kewenangan terhadap pembuatan aturan baru yang akan berdampak pada pengadaan amunisi strategis KRI untuk operasi tempur laut pada masa perang.

System Thinking Pengadaan Amunisi

Tahapan ini merupakan tahapan ketiga dari pendekatan SSM dengan penentuan Root definition guna menjawab rumusan dari pertanyaan yang terdiri dari 2W+1H yaitu what, why, how atau dengan kata lain apa, mengapa dan bagaimana. Kontekstual penelitian ini menetapkan dua pertanyaan sebagai representasi dari pertanyaan penelitian.

"Melakukan (do) P, dengan (by) Q, untuk mencapai (in order to achieve) R"

Masuk kedalam tahapan keempat dari pendekatan SSM yaitu pembentukan model konseptual dengan mengkorelasikan keseluruhan aktivitas kedalam proses T (pada tabel analisis CATWOE) kedalam bentuk sistem yang integral. Tahapan ketiga ini merupakan proses penggabungan keseluruhan langkah sebagaimana yang sudah dimaksudkan dalam tahapan ketiga (root definition) sebagai penentuan sistem dalam penyelesaian masalah yang relevan. Penelitian ini memiliki fokus terhadap cara pengadaan amunisi strategi KRI dalam menghadapi operasi tempur laut saat perang. Berbagai alternatif yang muncul kemudian dipilih sesuai dengan kecocokannya berdasarkan keadaan di Indonesia sekarang.

Perbandingan Model Konseptual dengan Realitas

Selanjutnya peneliti akan melakukan perbandingan model konseptual sesuai dengan realitas yang terjadi saat penelitian di lokus penelitian atau ketika proses pengumpulan data terjadi. Perolehan data dirumuskan berdasarkan langkah yang direkomendasikan dari berbagai alternatif. Selanjutnya peneliti melakukan penentuan pertanyaan guna melakukan peninjauan ulang terhadap realitas sesuai model konseptual. Pembentukan pertanyaan didasarkan pada pemikiran logis peneliti yang merupakan praktisi dalam SSM.

Pembahasan dan Interpretasi

Setelah peneliti membandingkan model konseptual tersebut, peneliti menganalisa lebih dalam sesuai dengan teori yang relevan, dengan memadupadankan hasil wawancara dari informan dan penelitian terdahulu yang kemudian relevansi data-data tersebut ditentukan bagaimana kedudukannya dalam penelitian dalam pembentukan pola pikir penelitian.

Alternatif Pengadaan Amunisi Strategis KRI Saat Kondisi Perang

Serangkaian proses tersebut telah menghasilkan berbagai alternatif dalam pengadaan amunisi strategis KRI dalam kondisi perang. Alternatif yang dihasilkan tersebut kemudian melalui proses analisa dan perbandingan yang digunakan peneliti dalam penentuan penyelesaian masalah sesuai kondisi Indonesia saat ini. Alternatif-alternatif tersebut akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 : Alternatif-Alternatif Pengadaan Amunisi Strategis

No	Alternatif-Alternatif
1.	Pembelian langsung
2.	Pemenuhan <i>basic load</i>
3.	Pengembangan industri pertahanan
4.	Membentuk aliansi/koalisi

(Sumber: Diolah Sendiri Peneliti, 2024)

Menurut penelitian Zhang Yunzhuang, modernisasi militer Tiongkok bertujuan untuk siap berperang dan memenangkan pertempuran. PLA (Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok) mampu memasok senjata canggih dan suku cadang dalam jumlah besar secara langsung dan andal, untuk menghadapi perang yang kompleks dan berkepanjangan. Oleh karena itu, proses pengadaan peralatan perang harus dilakukan jauh sebelum ancaman nyata muncul.

Berdasarkan analisis perbandingan model konseptual terhadap alternatif pengadaan amunisi strategis KRI dalam situasi perang, ditemukan adanya kesenjangan antara realitas di lapangan dan pemikiran sistem. Aktivitas yang diperlukan belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, menunjukkan adanya celah dalam penelitian ini yang perlu diperbaiki.

Tabel 2 : Gap Penelitian

GAP PENELITIAN	ANALISA
Melaksanakan persiapan pengadaan barang dan jasa pada masa damai	a. UU b. Teori Logistik c. wawancara d. Penelitian

(Sumber: Diolah Sendiri Peneliti, 2024)

Dalam pelaksanaannya sehari-hari, Kementerian/Lembaga harus menggunakan Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh LKPP dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Nomor 7 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Pedoman ini mencakup berbagai alternatif pengadaan, seperti pembelian langsung, pemenuhan beban dasar (basic load), pengembangan industri pertahanan, dan pembentukan aliansi/koalisi. Persiapan pengadaan barang dan jasa selama masa damai melibatkan beberapa aspek, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan, b. Teori logistik, c. Wawancara, d. Penelitian terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perencanaan pengadaan barang/jasa adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, metode pengadaan, jadwal, dan anggaran pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan melalui swakelola, di mana barang/jasa dihasilkan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau oleh organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat.

Untuk pengadaan barang/jasa alutsista, hal ini sangat terkait dengan kebijakan pertahanan negara. Mengingat Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif serta tidak berafiliasi dengan blok atau pakta pertahanan tertentu, maka perlu penguatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan insentif untuk riset dan pengembangan yang membutuhkan biaya besar, dimulai dari industri hulu hingga hilir di bidang pertahanan. Karena produk dari negara yang terikat pada pakta pertahanan tidak selalu dijual ke negara di luar pakta tersebut, teknologi terbaik mungkin tidak akan sampai ke Indonesia.

Menurut Henry E. Eccles, logistik operasi mencakup semua yang terkait dengan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan material, fasilitas, dan jasa secara tepat waktu agar dukungan logistik dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Eccles menjelaskan hubungan antara strategi, logistik, dan taktik dalam operasi tempur laut. Strategi dan taktik adalah cara yang digunakan oleh pemimpin militer untuk mencapai tujuan, yaitu memenangkan perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan logistik yang memadai bagi

personel dan peralatan tempur sangat penting. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain.

Oleh karena itu, pengadaan amunisi senjata strategis untuk kondisi perang harus dipersiapkan mulai sekarang dengan memenuhi kebutuhan minimal sesuai beban dasar. Jika memungkinkan, anggaran yang cukup harus dialokasikan untuk memastikan ketersediaan amunisi strategis mencapai tiga kali lipat dari beban dasar.



Gambar 4. Word Frequency Query
(Sumber: Diolah Sendiri Nvivo12, 2020)

Menentukan Alternatif

Dalam situasi perang, peran pejabat dalam pelaksanaan kampanye militer sangat krusial, karena kebijakan politik negara yang ditetapkan oleh pejabat strategis menjadi dasar pelaksanaan kampanye militer. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam perencanaan kampanye militer termasuk Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang dipimpin oleh Presiden. Anggota Wantannas terdiri dari berbagai pejabat berwenang.

Dalam penelitian ini, beberapa alternatif terbaik untuk pengadaan amunisi strategis saat krisis atau perang adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan dengan Negara Sahabat: Ini penting untuk menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan negara sahabat, memastikan situasi tetap kondusif saat krisis berakhir. Walaupun ini hanya sebagian dari keseluruhan strategi, pengadaan melalui negara sahabat tetap penting.
2. Pengadaan Saat Krisis/Perang: Dalam kondisi krisis, pengadaan amunisi memerlukan terobosan dalam kebijakan luar negeri dan hubungan tingkat tinggi yang dijalankan oleh pejabat militer atau pertahanan.
3. Pengembangan Industri Dalam Negeri: Mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri secara masif melalui penelitian dan pengembangan yang intensif. Ini melibatkan uji coba laboratorium dan lapangan yang dipercepat dengan penambahan fasilitas uji coba di berbagai wilayah yang tidak berpenghuni untuk mendapatkan hasil yang cepat dan optimal.

Alternatif lain terkait pengadaan amunisi strategis dalam kondisi krisis atau perang adalah:

1. Mengabaikan Prosedur Pengadaan Normal: Proses pengadaan yang berlaku pada masa damai harus diabaikan, karena yang penting dalam masa perang adalah mendapatkan barang dengan cepat.
2. Pengadaan Paket Amunisi dan Alutsista: Sebaiknya, pengadaan saat masa damai dilakukan dengan membeli alutsista yang sudah dilengkapi dengan amunisinya, sesuai dengan kebutuhan dasar. Idealnya, cadangan amunisi harus mencapai lima kali beban dasar untuk memastikan ketersediaan saat perang. Amunisi yang tidak digunakan pada masa damai dapat di-refurbish untuk masa mendatang.
3. Membangun Industri Pertahanan Nasional: Jika memungkinkan, industri pertahanan dalam negeri harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Pembelian kapal sebaiknya dilakukan sekaligus dengan amunisinya dalam jumlah besar, memungkinkan adanya kerjasama Transfer of Technology (TOT).

Dr. Bambang Suharjo, yang menjabat sebagai Sekdisinfohatal, menyatakan bahwa “Setiap cara memiliki keunggulan masing-masing dan jika dipadukan menghasilkan kekuatan optimal untuk pertahanan negara, meningkatkan kewibawaan negara, memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dan meningkatkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia”.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Laksamana Madya TNI Dr. A. Octavian, S.t., M.Sc., DESD, Rektor Universitas Pertahanan (UNHAN), juga mendukung alternatif-alternatif tersebut. Beliau menjelaskan, “Untuk membangun industri pertahanan, kerjasama internasional melalui TOT sangat penting. Kemenhan dan Kemenlu memiliki peran utama dalam menjalin kerjasama keamanan dengan luar negeri. Kerjasama harus cerdas, memahami aturan negara mitra, bukan hanya memaksakan aturan kita sendiri.”

Penelitian terdahulu oleh Angga Nurdin Rahmat menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan dengan negara-negara seperti Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia, yang dibentuk pada tahun 1971 (FPDA), bertujuan melindungi Singapura dan Malaysia yang baru merdeka. Pada saat itu, ancaman utama adalah Indonesia dengan armada militer terbesar dan tercanggih. Dalam kerangka FPDA, konsultasi dilakukan jika kedua negara tersebut mengalami serangan langsung.

Efisiensi Ekonomi Pengadaan Saat Eskalasi Langsung

Amunisi strategis KRI termasuk dalam kategori alutsista. Aturan pengadaan alutsista diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Menurut peraturan ini, ada tiga metode pengadaan: penunjukan langsung, pemilihan khusus, dan pembelian langsung.

Pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan pertahanan negara, termasuk strategi pertahanan, kerahasiaan, dan kebutuhan mendesak untuk penanganan darurat. Keadaan tertentu ini ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini Menteri Pertahanan. Ayat 7 menyebutkan bahwa pembelian langsung dilakukan dalam situasi mendesak, yaitu ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar

negeri, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR untuk mengatasi ancaman tersebut secara efektif. Pembelian langsung dilakukan untuk alutsista yang sudah tersedia.

Aturan ini sebenarnya telah mengakomodasi berbagai kondisi yang dianggap darurat. Meskipun Peraturan Menteri Pertahanan tersebut masih merujuk pada peraturan pengadaan barang dan jasa yang lama, saat ini pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Oleh karena itu, dalam situasi darurat perang, pengadaan amunisi strategis dapat dilakukan dengan dua cara: penunjukan langsung atau pembelian langsung.

Contoh pembelian alutsista secara langsung pernah terjadi saat Indonesia menghadapi Belanda dalam kampanye militer. Di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno, Indonesia mencari peralatan dari Uni Soviet, yang bersedia menjual persenjataan yang dibutuhkan. Pada tahun 1960, misi yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional A.H Nasution berangkat ke Moskow dan berhasil menandatangani kontrak pembelian senjata senilai \$500 juta, seperti ditunjukkan pada gambar 4.

Dengan aturan dan pengalaman sebelumnya, kita dapat melihat bahwa pengadaan alutsista dan amunisi strategis dalam situasi darurat perang dapat dilakukan dengan efisien melalui penunjukan langsung atau pembelian langsung.



Gambar 4 Word Tree
(Sumber: Diolah Sendiri, 2020)

Saat ini, industri pertahanan suatu negara sangat erat kaitannya dengan perkembangan ekonominya. Industri pertahanan ini mencakup produksi alat-alat kebutuhan pertahanan, termasuk alat utama sistem senjata (alutsista) seperti senjata ringan, senjata berat, kendaraan tempur, dan kendaraan pendukung kegiatan pertahanan, serta pemeliharaan dan perbaikannya. Industri pertahanan merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan keamanan negara. Oleh karena itu, pengembangan industri pertahanan harus menjadi bagian dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional.

Mekanisme implementasi kebijakan industri pertahanan yang kuat dan jelas, serta pengelolaan rantai pasok yang baik, sangat penting untuk memastikan ketersediaan alutsista dan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Pengembangan industri pertahanan penting karena mendukung pertahanan dan keamanan negara, dan harus terintegrasi dalam perencanaan strategis nasional.

Kemampuan pengelola industri pertahanan dalam menyusun strategi pengembangan industri ini, baik dalam hal manufaktur, rancang bangun, maupun riset dan pengembangan, perlu didukung dengan pemahaman logistik yang kuat. Industri pertahanan harus menguasai teknologi alutsista dan alpalhankam lainnya serta memastikan ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

Undang-undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menekankan pentingnya kemandirian dalam ketersediaan alutsista dan alpalhankam, yang didukung oleh kemampuan industri pertahanan yang dikelola dengan manajemen visioner. Ini harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengandalkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme, intelektualitas tinggi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Sesuai penelitian Zhang Yunzhuang, bahwa penelitian ini mencakup tiga topik bahasan, yang pertama strategi keamanan dan militer nasional Tiongkok, kedua pengambilan keputusan proses pengadaan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok, dan ketiga tentang sistem dukungan dan mobilisasi militer Tiongkok. Kesimpulan penelitian ini adalah, Modernisasi militer Tiongkok adalah untuk berperang dan memenangkan pertempuran dengan cara PLA dapat secara langsung dan handal memasok senjata canggih dan suku cadang dalam jumlah besar, untuk menghadapi perang yang kompleks dan berkepanjangan.

Menurut Prof. Udisubakti Ciptomulyono, untuk pengadaan barang/jasa alutsista sejatinya sangat terkait dengan kebijakan pertahanan negara. Negara kita yang bebas aktif tentunya tidak berafiliasi ke satu blok atau pakta pertahanan. Oleh karena itulah justru kita harus memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri dengan memberikan semacam insentif untuk riset dan pengembangan, yang memang memerlukan pembeayaan yang besar. Kita harus melakukan riset mulai dari industri hulu sampai dengan hilir dalam bidang industri pertahanan. Karena bisnis industri pertahanan tidak melulu menjual barang tetapi terkait dengan kebijakan pertahanan negara. Produk suatu negara yang terkait dengan pakta pertahanan tidak akan begitu saja dijual ke negara lain di luar pakta tersebut sehingga bisa saja teknologi terbaik tidak sampai ke negara kita. Kunci utamanya dalam riset adalah SDM yang unggul dipersiapkan, aturan yang menaungi dan pendanaan yang mencukupi serta diimplementasikan dalam sinergitas antar entitas dan Lembaga/institusi dalam pola yang sudah disusun dalam bentuk peta jalan yang jelas, terukur, konsisten dalam jangka pendek, sedang dan panjang.

Sinergitas antara Lembaga riset dan Kemhan/TNI dikembangkan dalam kerangka itu dalam skema yang disusun dalam bentuk ROADMAP (peta jalan) Penelitian alutsista yang disusun dan disepakati Bersama Kemhan/TNI, Industri Pertahanan dan Perguruan tinggi. Sejalan dengan pendapat Dr. Bambang Suharjo yang memiliki jabatan sebagai Sekdisinfoaltal, bahwa untuk pengadaan barang/jasa alutsista sejatinya sangat terkait dengan kebijakan pertahanan negara. Negara kita yang bebas aktif tentunya tidak berafiliasi ke satu blok atau pakta pertahanan. Oleh karena itulah justru kita harus memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri dengan memberikan semacam insentif untuk riset dan pengembangan, yang memang memerlukan pembiayaan yang besar. Kita harus melakukan riset mulai dari industri hulu sampai dengan hilir dalam bidang industri pertahanan. Karena bisnis industri pertahanan tidak melulu menjual barang tetapi terkait dengan kebijakan pertahanan negara. Produk suatu negara yang terkait dengan pakta pertahanan tidak akan begitu saja dijual ke negara lain di luar pakta tersebut sehingga bisa saja teknologi terbaik tidak sampai ke negara kita. Kunci utamanya dalam riset adalah SDM yang unggul dipersiapkan, aturan yang menaungi dan pendanaan yang mencukupi serta diimplementasikan dalam sinergitas antar entitas dan Lembaga/institusi dalam pola yang sudah disusun dalam bentuk peta jalan yang jelas, terukur, konsisten dalam jangka pendek, sedang dan panjang. Sinergitas antara Lembaga riset dan Kemhan/TNI dikembangkan dalam kerangka itu dalam skema yang disusun dalam bentuk ROADMAP (peta jalan) Penelitian alutsista yang disusun dan disepakati Bersama Kemhan/TNI, Industri Pertahanan dan Perguruan tinggi..

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Alternatif-alternatif cara cara pengadaan amunisi senjata strategis saat kondisi perang harus disediakan mulai dari sekarang dengan memenuhi kebutuhan minimal sesuai basic load, Pembelian langsung dalam hal ini pemerintah memerintahkan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri untuk ke negara lain membeli amunisi secara langsung, Negara Indonesia membentuk koalisi atau aliansi dengan negara sahabat dalam rangka kerjasama militer untuk mendukung amunisi strategis jika sewaktu-waktu Indonesia dalam kondisi krisis. Alternatif terakhir adalah membangun industri pertahanan nasional agar dapat membuat senjata sendiri sehingga tidak bergantung dengan negara asing. b. Cara atau alternatif terbaik dalam hal pengadaan amunisi strategis jika eskalasi langsung kondisi krisis yaitu dengan pembelian secara langsung Alutsista kapal, amunisi strategis. Selanjutnya untuk mempersiapkan jika sewaktu-waktu Indonesia menghadapi kondisi krisis adalah mengembangkan industri pertahanan nasional mulai dari sekarang. Hal ini tidak mustahil dengan sumber daya yang dimiliki Negara Indonesia dan Undang-undang yang mengatur industri pertahanan yang sudah ada. Hanya kemauan dan politik will dari para pejabat pemerintah khususnya sinkronisasi kementerian lembaga dalam rangka terwujudnya industri pertahanan nasional yang mampu mendukung kebutuhan Alutsista TNI..

Daftar Rujukan

Ade Maman Suherman. Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement). (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 2.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 4.

- Bandur, Penelitian Kualitatif, 193-194.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hal. 132.
- Checkland, P. and Scholes, J. Soft System Methodology in Action. (1991).
- Checkland, Peter B. & Poulter, J., Learning for Action: A short definitive account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners, teachers and Students, (England: John Wiley & Sons Ltd, The Atrium Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, 2006).
- Clausewitz, Carl von. On War. (Princeton: Princeton University Press, 1976).
- Cooper, Donald R. dan C. Wiliam Emory. Business Research Methods. Fifth Edition. Richard D. Irwin, Inc. (1995).
- George R. Terry. Prinsip-Prinsip Manajemen. Hardjosoekarto, S. Soft Systems Methodology (Metodologi Serba Sistem Lunak). (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).
- Harlan Cleveland. Lahirnya Sebuah Negara Baru. Penerjemah P. Soemitro. Yayasan Obor Indonesia. (1993).
- Henry Kissinger, Diplomacy, 21 James Cable, Gunboat Diplomacy Political Application of Limited Naval Force, Praeger Publisher, New York, (1971), hal. 17.
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994).
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- S. Nasution. Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.
- Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, hal.
- Wiliam Emory. Business Research Methods. Fifth Edition. Richard D. Irwin, Inc. (1995).
- Adam L. Chalkley. "An Engaged Vietnam: Developing A U.S. Pacific Command Solution, Naval War College. (2013).
- Angga Nurdin Rahmat. "Five Power Defence Arrangements Dalam Pandangan Konstruktivisme". (2013). Chris Hughes. Japan's emerging arms transfer strategy: diversifying core-centre on the US-Japan alliance. The Pacific Review, VOL. 31, NO. 4, 424-440. Politics and International Studies, University of Warwick, Coventry, UK. (2018).
- Ilman Dzikri. negara dan kapasitas adopsi inovasi: studi kasus transformasi pertahanan indonesia 305 global: jurnal politik internasional 2016 vol. 18 no. 2 hlm. 131-151. doi: 10.7454/global.v18i2. e-issn: 2579-8251. periode 1998-2014
- Sulaiman, Yohanes. Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Pengadaan Alutsista : Studi Kasus Pengadaan Helikopter Angkut Berat TNI. Jurnal Pertahanan, Volume 6, Nomor 3. (2016).
- Thayer, Charlyl A, "The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever", Security Challenge, Vol. 3, (2007).
- Tuwanto, Pebri. Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global. Gema Keadilan, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011). Volume 2, Edisi 1. (2015).
- Zhang Yunzhuang. "Tiongkok's Military Procurement And Its Operational Implications: A Respon to Yoram Evron. The Journal of Strategic Studies Vol. 35, No. 6, 887-896. Routledge Journal, (2012).
- Amandemen keempat UUD 1945 Tahun 2002. Kepres Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1513/V/2019 Tentang Kebijakan Perencanaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020.
- Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/265/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Doktrin Kampanye Militer. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 D.
- Publikasi Elektronika Admin, Presiden Joko Widodo Kunjungi Unsur Gelar Koarmada I Di Natuna, januari 01, 2020, diakses pada Pukul 11.24,
- <https://www.tnial.mil.id/berita/289/presiden-joko-widodo-kunjungi-unsur-gelar-koarmada-i-di-natuna/>
- Bambang Arifianto, Sumber Daya Energi Akan Jadi Sumber Peperangan, Agustus 12, 2016, diakses pada Pukul 11.02,
- <https://www.pikiranrakyat.com/jawa-barat/pr01261414/sumber-daya-energi-akanjadi-sumber-peperangan-376297>.
- Bureau of Political-Military Affairs. US Department of State, Remark and Release, USA. 2019.
- Karya Indonesia. File:///C:/Users/user_2019/Downloads/kina%20%202012%20(1).pdf. (2012)
- Kusumadewi, A., & Armenia, R.. Kisah Embargo AS dan Sukhoi Rusia di Balik Jet Tempur RI. Dipetik Mei 20 2016, dari CNN Indonesia. (2016)
- Wira. Pentingnya Kemampuan 4PL dalam Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia, November-Desember, 2016, diakses pada pukul 10.30, <https://www.kemhan.go.id/wpcontent/uploads/2017/01/WIRA-Nov-Des-2016-Gabungan-2.pdf> Yosepha Pusparsa & Safrezi Fitra, Anggaran Militer Negara yang

Berbatasan Laut Cina Selatan, Januari 6, 2020, diakses pada Pukul 23.15,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/06/belanja-militer-negara-di-perbatasan-laut-Tiongkok-selatan-siapa-paling-besa>